

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN  
PEMERINTAH, PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SE SUMATERA**

**RINY VIRI INSY SINAGA  
NIDN: 0106128601**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan  
Jl. Sisingamangaraja Km 5, No. 10 Medan  
*Email: riny30vinsi@gmail.com*

**Abstrak**

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera. Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, teknik analisis regresi berganda dengan effect model acak. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera, sementara belanja pemerintah terbukti berpengaruh signifikan negatif dan Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera.

*Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, Inflasi*

**A. Pendahuluan**

Banyak definisi tentang kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan telah didefinisikan berbeda-beda dan merefleksikan suatu spektrum orientasi ideologi. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Pandji-Indra, 2001). Parwoto (2001) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau

kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Sedangkan Kemiskinan menurut Sumedi dan Supadi (2000) muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Bappenas (2002) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Sedangkan Ravallion (2001) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Sukirno 2003,

Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Faktor lain yang turut berperan dalam kemiskinan adalah inflasi dan pengeluaran pemerintah. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat berpendapatan tetap akan tergerus daya belinya, sehingga bagi masyarakat miskin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Sementara

pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengalokasikan anggaran belanjanya pada kepentingan publik, khususnya masyarakat miskin, sehingga kebijakan anggaran yang tepat akan mampu mengurangi angka kemiskinan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Se Sumatera?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Bagaimanakah pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Se Sumatera

### **B. Tinjauan Pustaka**

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam Nurhayati (2007), klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu :

- a) Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering

disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

- b) Kemiskinan Relatif yakni Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibanding kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan.
- c) Kemiskinan Struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
- d) Kemiskinan Kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a) Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; b) Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah kritis sumberdaya alam dan daerah terpencil); c) Rendahnya pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
- e) Kemiskinan Sementara terjadi akibat adanya (i) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (ii) perubahan yang bersifat musiman dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barangbarang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan

ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen: *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro, 2003).

### **Pengeluaran Pemerintah**

Menurut William A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel makroekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit. Kebijakan fiskal penstabil otomatis atau disebut juga stabilisator terpasang menurut Lipsey (2000) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier.

### **Pengangguran**

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004).

### **Inflasi**

Menurut Sadono Sukirno (2004) berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*) Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat.
- b) Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*) Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi.

### **Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Maruti Nurhayati (2007) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Barat menggunakan variabel pendapatan, pendidikan, jumlah pengangguran dan tingkat ketergantungan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda diperoleh hasil Koefisien regresi untuk pendapatan bernilai negatif yaitu sebesar 0,002 yang berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,002 persen. Tingkat pendidikan memiliki koefisien regresi bernilai negatif yaitu 0,38 yang berarti jika tingkat pendidikan meningkat satu persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,38 persen. Nilai koefisien regresi untuk tingkat pengangguran bernilai positif yaitu sebesar 0,17 yang berarti jika tingkat pengangguran meningkat satu persen maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,17 persen.

Koefisien regresi untuk variabel tingkat ketergantungan bernilai positif sebesar 0,23. Hal tersebut berarti jika tingkat ketergantungan meningkat sebesar satu persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,23 persen Adit Agus Prastyo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (studi kasus 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007) menggunakan metode panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini

adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Nurhayati dan Prastyo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel yang sama adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Variabel pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi merupakan variabel baru yang tidak ada pada penelitian terdahulu.

### **C. Metode Penelitian**

#### **Tipe Penelitian**

Secara eksplanasinya, penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Disebut penelitian Asosiatif dikarenakan studi ini menguraikan bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera.

#### **Sumber dan jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2011:37). Data yang akan dikumpulkan meliputi data Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data Perkembangan Inflasi, Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui internet dengan situs antara lain; [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtun waktu). Menurut Gujarati (2004) pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, panel data

mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. *Kedua*, jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, penggunaan panel data akan mengurangi masalah omitted variabel secara substansial. *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang – ulang (time series), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai study of dynamic adjustment. *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien .

### **Teknik Analisis Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan tehnik analisis kuantitatif yaitu analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Dengan Model yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Di mana;

Y	= Tingkat Kemiskinan
X1	= Pertumbuhan ekonomi
X2	= Pengeluaran Pemerintah
X3	= Tingkat pengangguran
X4	= Laju Inflasi
a	= konstanta
b1,	= Koefisien regresi
b2,	
b3,	= Error term
b4	
e	

#### **D. Hasil Dan Pembahasan Hasil Penelitian**

Secara umum tingkat kemiskinan masing-masing provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2011-2015 menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Selama periode ini, Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu mencapai 26,65 persen di tahun 2011 dan menjadi 19,57 di tahun 2015. Selain Aceh, daerah lainnya yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi juga antara lain Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, ke enam provinsi lainnya di pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan rendah. Sampai tahun 2015, provinsi Bangka Belitung merupakan daerah

dengan tingkat kemiskinan terendah, yaitu mencapai 5,75 persen atau kurang dari setengah tingkat kemiskinan nasional di tahun yang sama, disusul oleh provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,4 persen.

Provinsi Aceh juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tidak mengembirakan. Hal ini data dilihat selama tahun 2011-2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi aceh minus 1,09 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai minus 5,51 persen. Sementara itu, sembilan provinsi lainnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relative tidak jauh berbeda. Secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi provinsi jambi merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 7,24 persen, disusul Bengkulu (6,31 persen) dan Sumatera Utara (6,26 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini:

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di pulau Sumatera selama periode 2011-2015 menunjukkan beragam fluktuasi. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi diberbagai Negara lain terutama negaranegara eropa secara signifikan, nampaknya hal tersebut juga

berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi di pulau Sumatera. Misalnya, Pertumbuhan Ekonomi Riau menjadi 2,97 persen di tahun 2009 setelah ditahun 2008 tumbuh 5,65 persen, begitu juga Bangka Belitung dan Kepulauan Riau masing masing tumbuh 3,70 persen dan 3,52 persen. Penurunan ini juga dirasakan secara nasional yang mencapai 4,58 persen.

Perkembangan pengeluaran pemerintah provinsi di Pulau Sumatera secara umum cenderung berfluktuasi, kecuali provinsi Sumatera Selatan yang selama periode 2011-2015 menunjukkan *trend* peningkatan. terus menerus. Pada tahun 2011, nilai pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD sebesar Rp. 2,3 triliun dan naik menjadi Rp. 2,6 triliun di tahun 2014.

Tingkat pengangguran provinsi secara umum menunjukkan trend yang baik, di mana selama periode 2011-2015 terus terjadi penurunan terhadap tingkat pengangguran terbuka di masing-masing provinsi di pulau Sumatera. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di provinsi Aceh yang rata-rata mencapai 8,78 persen, diikuti oleh provinsi Sumatera utara sebesar 8,29 persen dan Riau 8,12 persen. angka kemiskinan ketiga provinsi ini juga berada di atas rata-rata nasional yang mencapai sebesar 7,82 persen.

Perkembangan Inflasi selama periode 2011-2015 terlihat sangat berfluktuasi. Pada tahun 2012 merupakan puncak inflasi tertinggi pada hampir sebagian besar provinsi di Sumatera. Di Bangka Belitung Inflasi bahkan mencapai 18,4 persen, diikuti oleh Bengkulu 13,4 persen dan Sumatera Barat 12,7 persen. Secara rata-rata, inflasi yang terjadi di Bangka Belitung merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 7,5 persen, disusul Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat. Tingkat inflasi di daerah ini juga berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 6,2 persen.

### **Analisis Regresi Berganda**

Berdasarkan data yg diolah, dapat dibuat hasil persamaan regresi yaitu yang diperoleh, yaitu :

$$Y = 10,04680 - 0,083779X_1 - 0,000650X_2 + 0,719120X_3 + 0,055460X_4$$

Nilai konstanta sebesar 10,04680, artinya bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Pengangguran (X3), dan Inflasi (X4) tidak mengalami perubahan atau dianggap nol, maka tingkat kemiskinan yang terjadi adalah sebesar 10,04680 persen.

Nilai koefisien b1 sebesar -0,083779, artinya bahwa jika pertumbuhan ekonomi (X1) mengalami peningkatan 1 persen, maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,08 persen, dengan asumsi variabel Pengeluaran Pemerintah (X2), Pengangguran (X3), dan Inflasi (X4) dianggap konstan.

Nilai koefisien b2 sebesar -0,000650, artinya bahwa jika Pengeluaran Pemerintah (X2) mengalami

peningkatan 1 milyar rupiah, maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,000650 persen dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi (X1), Pengangguran (X3), dan Inflasi (X4) dianggap konstan.

Nilai koefisien b3 sebesar 0,719120, artinya bahwa jika Pengangguran (X3) mengalami peningkatan 1 persen, maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,719120 persen, dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), dan Inflasi (X4) dianggap konstan.

Nilai koefisien b4 sebesar 0,055460, artinya bahwa jika Inflasi (X4) mengalami peningkatan 1 persen, maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,055460 persen, dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), dan Pengangguran (X3) dan dianggap konstan.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan ketepatan atau *goodness of fit* model yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,62. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi telah memberikan kontribusi sebesar 62 persen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Sedangkan sisanya sebesar 38 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam studi ini. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan cukup baik untuk

menjelaskan bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera.

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh simultan pengaruh variabel-variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil analisa data menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 18,6 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan Alpha 5 %, maka nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari Alpha yang ditetapkan ( $0,0000 < 0,05$ ). Dengan demikian kita dapat menolak  $H_0$  dan mengambil kesimpulan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera.

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua variabel bebas terbukti memiliki hubungan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar -0.906729 dengan probabilitas sebesar 0.3694 . Artinya probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada Alpha 0,05. ( $0.3694 > 0,05$ ), sehingga kita tidak dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negative secara tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, nilai t hitung variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) adalah sebesar -3.348669 dengan probabilitas 0.0016. Artinya nilai probabilitas lebih kecil dari Alpha 0,05 ( $0,0016 < 0,05$ ), sehingga kita dapat menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah (X2) berpengaruh negative secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera. variabel Tingkat Pengangguran (X3) sebesar 4.805927 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha 0,05. ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Pengangguran berpengaruh positif secara signifikan terhadap Tingkat

Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan nilai  $t$  hitung variabel Inflasi ( $X_4$ ) sebesar

1.439341 dengan probabilitas sebesar 0.1570. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada Alpha 0,05. ( $0,1570 > 0,05$ ), sehingga kita tidak dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera.

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dari ke empat variabel yang digunakan untuk melihat determinan dari kemiskinan di provinsi se pulau Sumatera, terlihat bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) dan Inflasi ( $X_4$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Hasil ini berbeda dengan argumentasi Sukirno (2003) yang mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kenaikan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berbeda juga dengan hasil penelitian Adit Agus Prastyo (2010), dan Richard (2003) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil studinya menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Lonnie dan David (2002) juga menggambarkan adanya hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di USA dalam jangka panjang, meskipun dalam periode waktu tertentu perilaku hubungan (elastisitasnya) sangat dinamis..

Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan terkait dengan tidak ditemukannya pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini pada dasarnya lebih ditopang oleh sektor konsumsi dari pada peran investasi atau pembentukan modal, sehingga kualitas pertumbuhan tidak begitu baik untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak diikuti dengan perbaikan pada pemerataan pendapatan, sehingga kenaikan perekonomian hanya dinikmati

oleh sebagian kelompok tertentu, sementara golongan masyarakat miskin tidak memperoleh kenaikan yang berarti.

Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) dan Pengangguran (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Pengeluaran Pemerintah terbukti mempunyai hubungan yang negative dan signifikan. Artinya, semakin besar pengeluaran pemerintah, maka akan semakin turun tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengeluarannya terutama pada alokasi belanja modal ataupun pengembangan infrastruktur, sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang.

Sementara itu, pengaruh positif signifikan variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin tinggi angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori dan argumentasinya bahwa ketiadaan pekerjaan atau disebut juga pengangguran, maka akan menyebabkan seseorang tidak mampu membiayai dirinya dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga akan tergolong pada kategori miskin. Hasil ini juga sekaligus menegaskan bahwa salah satu strategi paling efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan memperluas dan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan.

## **E. Penutup**

### **Simpulan**

Pertumbuhan ekonomi (X1) dan inflasi (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Hal dapat mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi relative kurang baik, yang antara lain disebabkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditopang oleh sektor konsumsi. Selain itu, kurang maksimalnya aspek pemerataan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan pendapatan cenderung dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

Pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbukti mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera.

Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negative dengan koefisien sebesar -0,083779, artinya peningkatan pengeluaran pemerintah sebanyak 1 milyar rupiah akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan provinsi turun sebesar 0,08 persen. Sementara itu, variable tingkat pengangguran terbukti berpengaruh secara positif dengan koefisien sebesar 0,719120. Dengan demikian penurunan tingkat Pengangguran (X3) sebesar 1 persen akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,719120 persen.

### Saran

Perlunya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor investasi atau pembentukan modal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempunyai multiplier efek yang luas dalam penurunan angka kemiskinan.

Meski terbukti tidak berpengaruh secara signifikan, tetapi pemerintah tetap perlu menekan angka inflasi sehingga tidak menggerus daya beli masyarakat secara berlebihan. Pemerintah perlu terus meningkatkan pengeluaran atau belanja daerahnya, terutama pada alokasi belanja modal atau pengembangan infrastruktur agar penurunan angka kemiskinan provinsi di Sumatera semakin cepat.

Perlu terus diupayakan kebijakan penyediaan atau perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, karena secara empiric terbukti bahwa pengurangan pengangguran akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera.

### F. Daftar Pustaka

- Gujarati, Damodar, 2003, *Basic Econometrics*, Fourth Edition. McGraw-Hill Companies, New York. Jhingan, ML., 2004. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, Gregory, 2006, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi Ketiga, Penerjemah : Chriswan Sungkono, Salemba Empat, Jakarta.
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.

- Mudrajad Kuncoro, 2003. *Ekonomi Pembangunan: Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Nurhayati, Maruti. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Barat*. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/15207/H07mnu.pdf?sequence=4>.
- Prasetyo, Adit A. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. [http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi\\_full\\_teks.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi_full_teks.pdf)
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. <http://ejournal.unud.ac.id/?module=detailpenelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=48&idr=191>.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan. Erlangga: Jakarta.
- Wongdesmiwati, 2009. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*. [http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhanekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-\\_analisis-ekonometri\\_.pdf](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhanekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometri_.pdf).